

**"Tema: 6 (Rekayasa Sosial dan Pengembangan Perdesaan)"**

**KEBIJAKAN ALOKASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH  
UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT: ANALISIS LAPORAN  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI  
JAWA TENGAH**

Oleh

Kikin Windhani<sup>1)</sup>, Herman Sambodo<sup>1)</sup>, Fajar Hardoyono<sup>2)</sup>

1)Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsoed

2)Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Tarbiyah IAIN Purwokerto

Email: kikinwindhani@gmail.com

**ABSTRAK**

Telah dilakukan penelitian untuk menganalisis kebijakan alokasi anggaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk keperluan analisis, dilakukan pencarian data laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari laman Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta data pendukung lain dari lama Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. Data yang digunakan untuk analisis data meliputi data APBD pemerintah kabupaten/kota serta alokasinya untuk belanja pegawai, belanja yang berorientasi kepada penguatan kapasitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan, serta belanja yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat Hasil penelitian menunjukkan temuan bahwa: (1) Hampir semua pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan belanja pegawai dengan prosentase 25% sampai dengan 60%. Sebanyak 4 pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan belanja pegawai yang menghabiskan lebih dari 60% dari total APBD. (2) Seluruh pemerintah kabupaten/kota memiliki kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi anggaran yang cukup untuk sektor penguatan ekonomi, pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, perumahan, dan fasilitas umum. Hampir seluruh pemerintah kabupaten kota membagi alokasi anggaran pada sektor-sektor tersebut di atas pada kisaran antara 10% sampai dengan 40%. Hanya 2 pemerintah kabupaten/kota yang mengalokasikan anggaran pendidikan kurang dari 8%, yaitu pemerintah Kabupaten Temanggung dan pemerintah Kota Semarang. (3) Alokasi anggaran peningkatan ekonomi dan pelayanan kesehatan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan skor HDI masyarakat Jawa Tengah. sedangkan alokasi anggaran pendidikan tidak cukup signifikan untuk meningkatkan HDI masyarakat.

Kata kunci : alokasi anggaran, pemerintah kabupaten/kota, Provinsi Jawa Tengah, kesejahteraan masyarakat

## **ABSTRACT**

Research has been carried out to analyze the policy of district / city government budget allocation in Central Java Province which is oriented towards improving community welfare. For analysis purposes, a district / municipal government financial report in Central Java Province is searched for data sourced from the pages of the Directorate General of Financial Balance, the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, and other supporting data from the Central Statistics Agency of Central Java. The data used for data analysis includes district / city government APBD data and their allocations for personnel expenditures, expenditures that are oriented towards strengthening bureaucracy and governance capacity, as well as expenditure oriented towards community welfare. The results of the study show that: (1) Almost all governments District / city allocates personnel expenditure with a percentage of 25% to 60%. As many as 4 district / city governments must allocate personnel expenditure which spends more than 60% of the total APBD. (2) All district / city governments have policies to improve community welfare through adequate budget allocations for the economic strengthening sector, health services, education, social protection, housing and public facilities. Almost all municipal governments divide the budget allocation in the sectors mentioned above in the range of 10% to 40%. Only 2 district / city governments allocated less than 8% of the education budget, namely the Temanggung Regency government and the Semarang City government. (3) Budget allocation for economic improvement and health services has a significant effect on increasing the HDI score of the people of Central Java. while the education budget allocation is not significant enough to increase the HDI community.

Keywords: budget allocation, district / city government, Central Java Province, community welfare

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Tujuan pertama dari pembangunan nasional yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum atau yang dikenal dengan kesejahteraan sosial dapat diukur dari beberapa hal. Salah satu cara yang paling mudah untuk mengukur kesejahteraan sosial adalah kemampuan dari masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar dalam menunjang perikehidupan manusia. Kebutuhan dasar yang paling mendesak untuk dipenuhi oleh manusia adalah kebutuhan primer meliputi kebutuhan pangan, sandang perumahan, kesehatan, pendidikan dan keamanan.

Para ahli pembangunan memiliki beberapa parameter terkait dengan kesejahteraan umum. Noll (2002) menggunakan parameter kemajuan sosial dan ekonomi untuk mengukur kesejahteraan umum. Parameter kemajuan sosial itu meliputi rasio pekerja dengan pengangguran, rasio masyarakat berpendidikan dengan tidak berpendidikan,

standar hidup, kualitas kesehatan, perlindungan sosial, keamanan sosial, tingkat kriminalitas, kualitas transportasi, dan kondisi lingkungan. Badan Pusat Perencana Pembangunan (Bappenas, 2010) sering menggunakan 6 indikator untuk mengukur kesejahteraan sosial masyarakat yang meliputi angka pengangguran, tingkat upah, angka kemiskinan, indeks kesengsaraan, indeks pembangunan manusia dan kesenjangan ekonomi. Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan 5 indikator kesejahteraan sosial yang diukur dari indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, indeks gini, indeks mutu hidup dan kerentanan sosial.

Seiring dengan implementasi otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki fungsi yang sangat strategis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat termasuk tentang urusan perekonomian masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 1999 hingga sekarang, terjadi pola pergeseran pembangunan ekonomi di daerah kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia dari pola sentralistik menjadi desentralisasi yang memberikan keleluasaan kepada daerah kabupaten/kota untuk membangun wilayahnya, termasuk dalam pengaturan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tujuan-tujuan strategis yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki berbagai masalah yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2018 menyebutkan bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah penduduk miskin sebesar 14,98%, merupakan provinsi dengan prosentase penduduk miskin tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 berada pada angka 69,98 dan berada pada peringkat ke-14 dari 35 provinsi di Indonesia. Sisi kesehatan masyarakat menunjukkan bahwa sebanyak 32,72% penduduk Jawa Tengah pada tahun 2017 memiliki keluhan kesehatan. Sementara itu, angka partisipasi kasar pendidikan di Jawa Tengah yang mampu meneruskan pendidikan ke jenjang SMA atau yang sederajat hanya mencapai angka 84.35% dan hanya berada pada posisi ke 18 dari 35 provinsi di Indonesia.

Hasil-hasil penelitian terdahulu banyak melaporkan penggunaan APBD kabupaten/kota banyak lebu banyak dialokasikan untuk program-program yang tidak berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat seperti belanja pegawai, biaya perjalanan dinas, rehabilitasi kantor/gedung pemerintah, dan tunjangan jabatan kepala daerah, anggota DPRD, dan pegawai pemerintah daerah. Waluyo (2010) melaporkan tentang banyaknya pemerintah kabupaten/kota yang mengalokasikan APBD untuk belanja pegawai melebihi angka 70% dari total APBD. Fakta ini diperkuat dengan pemberitaan dari detikfinance yang memberitakan bahwa masih terdapat 131 pemerintah kabupaten/kota di Indonesia yang mengalokasikan belanja pegawai di atas 50% dari total APBD pada tahun 2017.

Berdasarkan fakta tersebut diperlukan penelitian untuk menganalisis kebijakan alokasi anggaran pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang diperuntukkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data-data mengenai alokasi anggaran dapat diperoleh dari laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota tahun 2016 dan tahun 2017. Luaran dari penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang akurat mengenai kebijakan alokasi APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, hasil penelitian akan memberikan informasi pemerintah kabupaten/kota mana saja yang memberikan alokasi yang tinggi untuk kesejahteraan masyarakat. Luaran penelitian berwujud makalah yang disubmit ke jurnal nasional dan atau prosiding seminar nasional (Tabel 1). Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengajukan usul penelitian pemula dengan judul: "Kebijakan Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah untuk Kesejahteraan Masyarakat: Analisis terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah".

### **Permasalahan**

Permasalahan yang hendak dijawab melalui penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan alokasi anggaran pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk kesejahteraan masyarakat berdasarkan analisis laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota?
2. Pemerintah kabupaten/kota mana saja di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kebijakan alokasi anggaran yang tinggi untuk kesejahteraan masyarakat?

### **Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kebijakan alokasi anggaran pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk kesejahteraan masyarakat berdasarkan analisis laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota.
2. Untuk melakukan pemetaan pemerintah kabupaten/kota mana saja di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kebijakan alokasi anggaran yang tinggi untuk program-program yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis penelitian**

Penelitian dikategorikan sebagai penelitian survei. Data-data yang hendak dianalisis sebagian besar merupakan data primer yang berasal dari survei serta penelusuran laporan keuangan 35 pemerintah kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah. Sementara data sekunder yang bersumber dari Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) nasional, serta BPS Provinsi Jawa Tengah.

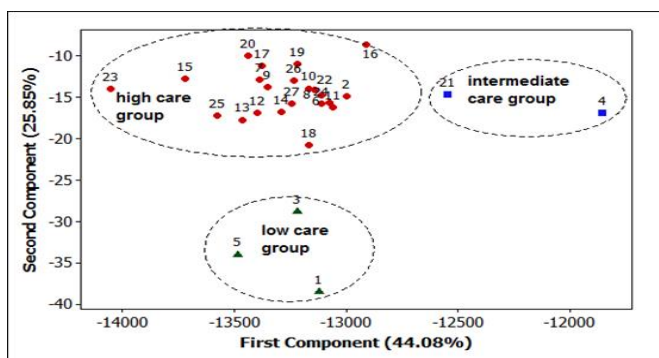
### **Variabel penelitian**

Variabel yang hendak diukur dari penelitian ini adalah:

1. Kebijakan alokasi anggaran 35 pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemetaan kebijakan alokasi anggaran untuk berbagai item yang meliputi:
  - a) Belanja pegawai dan aparatur sipil negara.
  - b) Pembiayaan ekonomi
  - c) Anggaran kesehatan
  - d) Anggaran ketertiban dan keamanan.
  - e) Anggaran lingkungan hidup
  - f) Anggaran pariwisata dan budaya.
  - g) Anggaran pelayanan umum
  - h) Anggaran pendidikan
  - i) Anggaran perlindungan sosial
  - j) Anggaran perumahan dan fasilitas umum

## Teknik analisis data

Kebijakan alokasi anggaran yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat 35 pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah dianalisis secara komputasi dengan menggunakan statistik multivariat. Metode statistik multivariat yang digunakan untuk analisis data adalah metode Principal Component Analysis (PCA), linear discriminant analysis, serta hierarchical cluster analysis sebagaimana pernah dilakukan oleh (Qin-dong & Jing, 2010). Data-data berkaitan dengan alokasi anggaran pemerintah kabupaten/kota yang bersifat multivariabel direduksi menjadi dua variabel utama meliputi variabel principal component pertama (PC1) dan variabel principal component kedua (PC2) melalui metode PCA. Nilai signifikansi dua variabel utama diketahui dari besarnya variansi yang diperoleh. Pemerintah kabupaten/kota mana saja yang memiliki alokasi anggaran tinggi terhadap program-program yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dapat diprediksi dengan melakukan interpolasi data kelompok variabel PC1 dan PC2 dalam koordinat kartesian. Identifikasi pemerintah kabupaten/kota yang memiliki kebijakan tinggi, sedang dan rendah terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dilihat menggunakan metode Cluster Analysis (CA). Simulasi hasil interpolasi data ditampilkan pada gambar 1.



Gambar 2.1 Simulasi hasil interpolasi variabel principal component pertama (PC1) dan principal component kedua (PC2) untuk memetakan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki alokasi anggaran untuk kesejahteraan masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk Belanja Pegawai

Alokasi anggaran belanja gaji dan tunjangan bagi pegawai dan aparatur sipil negara (ASN) merupakan salah satu mata anggaran yang paling banyak menghabiskan dana yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Hasil laporan

penelitian dari Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) dan The Ford Foundation (FF) pada tahun 2016 menyebutkan bahwa dari 53 kabupaten/kota di Indonesia yang diteliti rata-rata prosentase alokasi anggaran untuk belanja pegawai mencapai angka 52% dari total APBD yang dimiliki oleh daerah (Seknas Fitra, 2016).

## **2. Prosentase anggaran belanja pegawai**

Alokasi belanja APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang dikategorikan menjadi 3 jenis alokasi belanja yaitu: (a) belanja pegawai langsung dan tidak langsung, (b) belanja non pegawai yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan, dan (c) belanja non pegawai yang terkait dengan peningkatan kapasitas dan tata pamong pemerintahan. Belanja non pegawai yang berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat selanjutnya terdiri atas belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja non pegawai yang tidak berkaitan langsung dengan peningkatan peningkatan kapasitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan terdiri atas belanja bunga, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja lain-lain, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

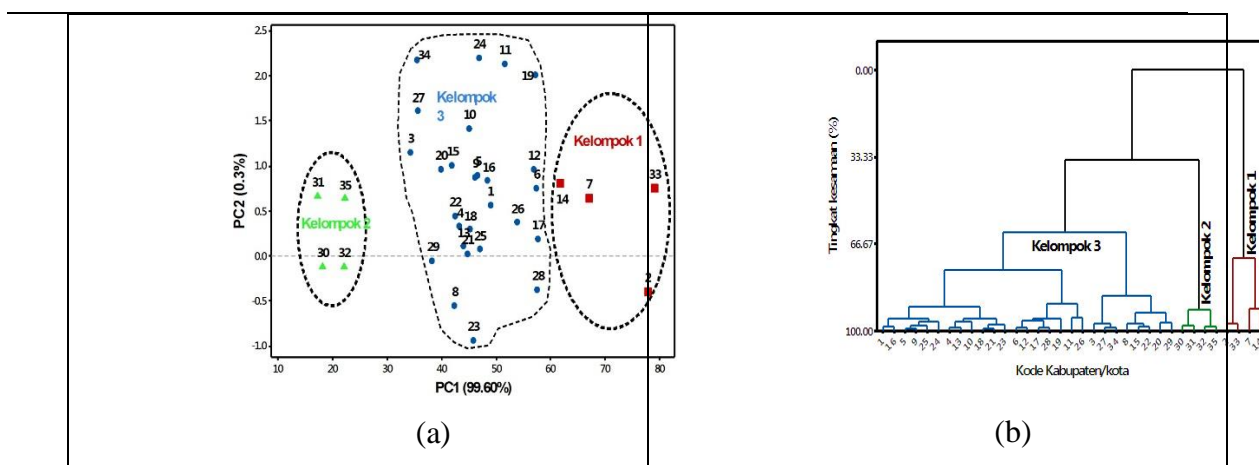
Alokasi APBD untuk belanja pegawai menjadi salah satu mata anggaran yang paling menghabiskan dana APBD pemerintah kabupaten/kota. Rerata prosentase APBD seluruh pemerintah kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah yang dibelanjakan untuk kebutuhan belanja pegawai langsung dan tidak langsung mencapai angka 46,25%.

Peneliti menggunakan analisis multivariat *berbasis principal component analysis* (PCA) dan *hierarchical cluster analysis* (HCA) untuk melompokkan 35 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah berdasarkan prosentase belanja pegawai ke dalam 3 kelompok. Kelompok I adalah kelompok pemerintah kabupaten/kota yang mengalokasikan belanja pegawai dengan prosentase sangat tinggi di atas 60%. Kelompok I terdiri atas pemerintah Kabupaten Banyumas (77,85%), pemerintah Kabupaten Cilacap (67,03%), pemerintah Kabupaten Klaten (61,84%), dan pemerintah Kota Semarang (79.02%).

Kelompok II adalah kelompok pemerintah kabupaten/kota yang mengalokasikan belanja pegawai dengan prosentase rendah kurang dari 25%. Kelompok II terdiri atas

pemerintah Kota Magelang (18,14%), pemerintah Kota Pekalongan (17.20%), Pemerintah Kota Salatiga (22.06%), dan pemerintah kota Tegal (22.21%).

Kelompok III adalah kelompok pemerintah kabupaten/kota yang mengalokasikan belanja pegawai dengan prosentase sedang antara 25% sampai dengan 60%. Sebanyak 27 pemerintah kabupaten/kota masuk dalam kategori ini. Secara detail, visualisasi PCA dan HCA untuk mengelompokkan kebijakan anggaran belanja pegawai 35 pemerintah kabupaten/kota ditampilkan pada Gambar 4.1.



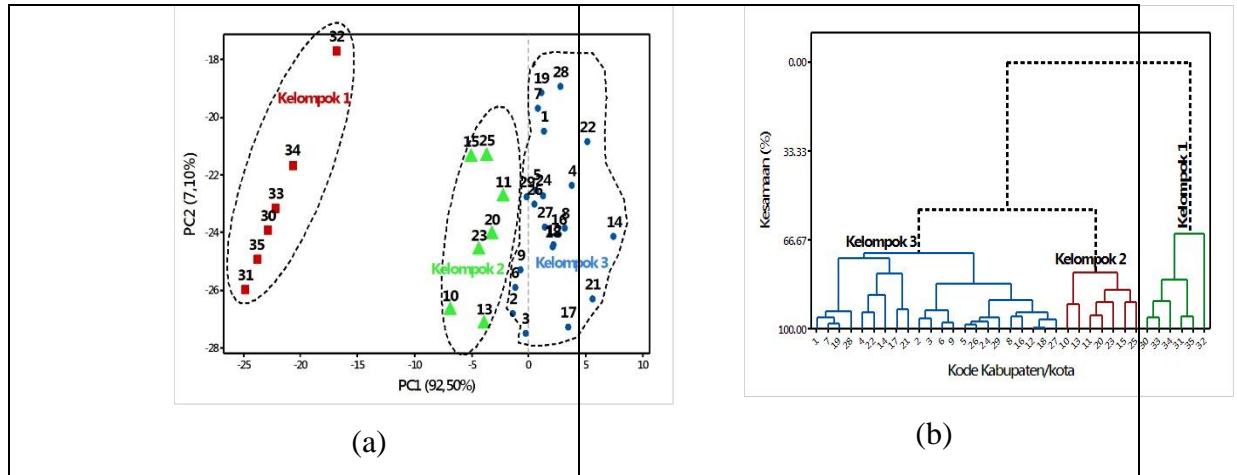
Gambar 4.1. Visualisasi pengelompokkan kebijakan belanja pegawai 35 pemerintah kabupaten/kota menggunakan: (a) PCA dan (b)HCA

### 3. Prosentase anggaran untuk peningkatan kapasitas dan tata kelola birokrasi

Dari sisi kebijakan alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan, analisis PCA dan HCA mengelompokkan 35 pemerintah kabupaten/kota ke dalam 3 kelompok. Kelompok I didefinisikan sebagai kelompok pemerintah Kabupaten/kota yang mengalokasikan prioritas belanja barang dan jasa serta belanja modal. Kelompok ini terdiri dari pemerintah Kota Pekalongan, pemerintah Kota Salatiga, Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Kota Surakarta, dan Pemerintah Kota Tegal. Kelompok II adalah kelompok pemerintah kabupaten/kota yang memprioritaskan anggaran untuk belanja bagi hasil dan bantuan kepada provinsi/kabupaten/kota/ dan pemerintah desa, Kelompok II terdiri dari pemerintah Kabupaten Jepara, pemerintah Kabupaten Karanganyar, pemerintah kabupaten Kudus, pemerintah Kabupaten Purbalingga, pemerintah Kabupaten Semarang, dan pemerintah kabupaten Sukoharjo. Kelompok III adalah kelompok pemerintah kabupaten/kota yang mengalokasikan belanja secara merata pada komponen belanja bagi hasil dan bantuan kepada



provinsi/kabupaten/kota/ dan pemerintah desa, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Secara detail, visualisasi PCA dan HCA untuk mengelompokkan kebijakan anggaran belanja pegawai 35 pemerintah kabupaten/kota ditampilkan pada Gambar 4.12.



Gambar 4.2. Visualisasi pengelompokkan kebijakan belanja untuk peningkatan kapasitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan 35 pemerintah kabupaten/kota menggunakan: (a) PCA dan (b)HCA

#### 4. Prosentase anggaran belanja untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

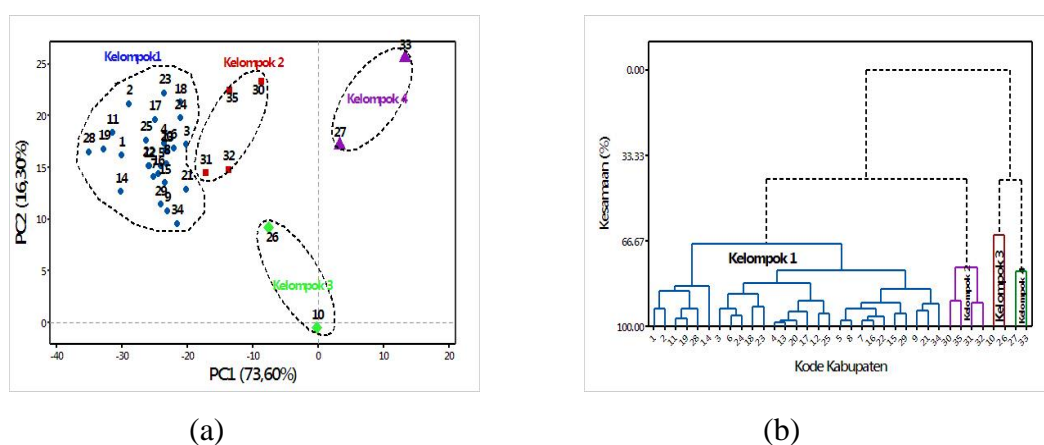
Selanjutnya, peneliti melakukan analisis kebijakan alokasi anggaran yang khusus digunakan untuk penguatan kesejahteraan sosial masyarakat berdasarkan data prosentase alokasi anggaran yang digunakan untuk membiayai 5 jenis anggaran yang terdiri dari: anggaran penguatan ekonomi daerah, anggaran kesehatan, anggaran pendidikan, anggaran perlindungan sosial, anggaran perumahan dan fasilitas umum.

Analisis PCA dan HCA menghasilkan pola kebijakan anggaran pemerintah kabupaten/kota pada sektor-sektor strategis yang berdampak langsung dengan kesejahteraan masyarakat sebagai berikut:

- A. Kelompok I, yaitu pemerintah kabupaten kota yang memprioritaskan APBD untuk sektor pendidikan di atas 30% dan sektor kesehatan pada angka 10% sampai dengan 20%. Daftar pemerintah kabupaten/kota yang masuk dalam kelompok ini terdiri atas 27 pemerintah kabupaten/kota.
- B. Kelompok II, yaitu pemerintah kabupaten/kota yang memprioritaskan APBD untuk anggaran kesehatan dan pendidikan yang hampir seimbang pada angka 20-30%, terdiri atas pemerintah Kota Magelang, pemerintah Kota Pekalongan, pemerintah Kota Salatiga, dan Pemerintah Kota Tegal.

- C. Kelompok III, yaitu pemerintah kabupaten kota yang membagi rata sekitar 10%-15% anggaran kesehatan, pendidikan, perumahan dan sarana umum yang terdiri atas pemerintah Kabupaten Jepara dan pemerintah Kabupaten Tegal.
- D. Kelompok IV, yaitu pemerintah kabupaten kota yang memiliki anggaran kesehatan tinggi (25% sampai dengan 35%) namun mengalokasikan anggaran pendidikan sangat rendah (kurang dari 8%), yaitu pemerintah Kabupaten Temanggung dan pemerintah kota Semarang.

Visualisasi PCA dan HCA untuk mengelompokkan kebijakan anggaran belanja pegawai 35 pemerintah kabupaten/kota ditampilkan pada Tabel 4.8. dan Gambar 4.3.



Gambar 4.2. Visualisasi pengelompokkan kebijakan belanja untuk kesejahteraan masyarakat pada 35 pemerintah kabupaten/kota menggunakan: (a) PCA dan (b)HCA

## 5. Dampak kebijakan anggaran terhadap indeks pembangunan manusia.

Sebagai pelengkap analisis data, peneliti menganalisis dampak kebijakan alokasi anggaran pemerintah kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah terhadap indeks pembangunan manusia (HDI). Skor HDI masyarakat yang tinggal di wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah diperoleh dari Badan Statistik Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.9. Berdasarkan literatur, skor HDI dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan tingkat pengeluaran. Secara tidak langsung pemerintah kabupaten/kota memiliki kontribusi signifikan untuk meningkatkan skor HDI masyarakat melalui peningkatan ekonomi masyarakat, kualitas pelayanan kesehatan, dan kualitas pendidikan.

Tabel 4.9. Prosentase alokasi anggaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa tengah pada komponen anggaran ekonomi, pendidikan dan kesehatan, serta skor HDI masyarakat di wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

No	Nama kabupaten/kota	Anggaran ekonomi	Anggaran kesehatan	Anggaran pendidikan	Skor HDI
1	Kab. Banjarnegara	4.17	13.63	37.69	65.86
2	Kab. Banyumas	4.20	16.85	38.17	70.75
3	Kab. Batang	6.89	17.37	29.03	67.35
4	Kab. Blora	6.30	16.93	32.39	67.52
5	Kab. Boyolali	7.63	15.27	32.15	72.64
6	Kab. Brebes	4.03	17.31	30.63	64.86
7	Kab. Cilacap	6.99	14.28	32.84	68.90
8	Kab. Demak	7.08	15.81	31.42	70.41
9	Kab. Grobogan	6.29	13.45	29.87	68.87
10	Kab. Jepara	17.61	11.34	5.23	70.79
11	Kab. Karanganyar	5.15	13.19	39.50	75.22
12	Kab. Kebumen	5.15	14.65	33.63	68.29
13	Kab. Kendal	6.35	17.19	31.76	70.62
14	Kab. Klaten	5.27	9.58	36.30	74.25
15	Kab. Kudus	10.90	14.91	31.63	73.84
16	Kab. Magelang	7.19	13.71	32.01	68.39
17	Kab. Pati	4.95	17.55	34.15	70.12
18	Kab. Pekalongan	3.92	21.20	31.22	68.40
19	Kab. Pemasang	5.63	12.21	40.35	65.04
20	Kab. Purbalingga	5.56	17.70	32.07	67.72
21	Kab. Purworejo	5.22	14.62	27.41	71.31
22	Kab. Rembang	7.82	13.33	33.61	68.95
23	Kab. Semarang	6.32	20.82	34.07	73.20
24	Kab. Sragen	4.96	19.12	30.55	72.40
25	Kab. Sukoharjo	4.88	14.29	34.42	75.56
26	Kab. Tegal	2.64	13.26	13.20	66.44
27	Kab. Temanggung	4.38	27.33	7.20	68.34
28	Kab. Wonogiri	5.23	11.97	42.60	68.66
29	Kab. Wonosobo	10.11	12.62	31.26	66.89
30	Kota Magelang	8.64	29.59	21.62	77.84
31	Kota Pekalongan	9.56	19.61	26.43	73.77
32	Kota Salatiga	11.65	22.63	24.01	81.68
33	Kota Semarang	3.91	34.74	0.19	82.01
34	Kota Surakarta	8.95	12.61	28.22	80.85
35	Kota Tegal	8.53	27.54	25.91	73.95

Ket.

- A. Anggaran penguatan ekonomi daerah
- B. Anggaran kesehatan
- C. Anggaran pendidikan
- D. Anggaran perlindungan sosial
- E. Anggaran perumahan dan fasilitas umum

(Sumber: [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id) setelah diolah)

Analisis regresi berganda dilakukan untuk menganalisis pengaruh kebijakan alokasi anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, dan anggaran ekonomi terhadap skor HDI di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Prosentase anggaran untuk penguatan ekonomi, prosentase anggaran kesehatan, dan prosentase anggaran pendidikan digunakan sebagai variabel bebas, sedangkan skor HDI digunakan sebagai variabel terikat. Hasil analisis regresi berganda memperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 59.39 + 0.553 A + 0.413 B + 0.0355 C$$

Dimana Y adalah variabel skor HDI, A adalah variabel anggaran penguatan ekonomi, B adalah anggaran kesehatan, dan C adalah anggaran pendidikan. Secara detail, hasil analisis regresi berganda ditampilkan pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Nilai koefisien variabel dan tingkat signifikansi pada analisis regresi berganda untuk mengukur pengaruh variabel anggaran ekonomi, anggaran kesehatan, anggaran pendidikan terhadap skor HDI

Nilai	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
(Konstanta)	59.390	5.622		10.564	.000
Ekonomi (A)	.553	.255	.352	2.167	.038
Kesehatan (B)	.413	.152	.513	2.722	.011
Pendidikan (C)	.036	.092	.075	.388	.701

a Dependent Variable: HDI

Persamaan regresi berganda memberikan makna bahwa skor HDI masyarakat di Provinsi Jawa Tengah tanpa afirmasi anggaran penguatan ekonomi, anggaran kesehatan, dan anggaran pendidikan sebesar 59,39. Alokasi setiap 1% anggaran penguatan ekonomi akan menaikkan skor HDI sebesar 0.553 dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. Sementara itu, alokasi setiap 1% anggaran kesehatan akan menaikkan skor HDI sebesar 0,41 dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. Sementara itu, berdasarkan data nilai signifikansi, alokasi 1% setiap anggaran pendidikan tidak mempengaruhi skor HDI. Dengan kata lain, skor HDI lebih dipengaruhi oleh alokasi anggaran untuk penguatan ekonomi dan peningkatan layanan kesehatan. Koefisien koefisien determinasi adjusted R<sup>2</sup> memberikan hasil bahwa anggaran penguatan ekonomi dan anggaran kesehatan memberikan pengaruh simultan terhadap HDI masyarakat di Jawa Tengah sebesar 23,49%.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang kebijakan otonomi daerah. Kebijakan ini dikeluarkan oleh pemerintah dan DPR untuk memfasilitasi tekanan politik yang tinggi dari para politisi, pemerintah daerah, dan mahasiswa melalui demonstrasi yang massif paska krisis ekonomi tahun 1997-1998. Selain itu, kebijakan otonomi daerah digunakan untuk menghilangkan isu separatisme di Aceh dan Papua sebagai dampak ketidakseimbangan distribusi kesejahteraan dan keadilan sosial serta pembagian hasil kekayaan alam antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan otonomi daerah selanjutnya berlanjut dengan kebijakan desentralisasi yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini pemerintah pusat membagi dan mengalihkan sebagian tugas, tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal kesejahteraan masyarakat.

Desentralisasi didefinisikan sebagai pengalihan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengelola tugas-tugas administratif dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah selanjutnya dimaknai sebagai pengalihan hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur fungsi negara. Pemerintah daerah otonom meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Kewenangan daerah-daerah otonom meliputi berbagai fungsi publik, seperti perencanaan dan pengaturan pembangunan, pendidikan dan pelayanan kesehatan, pengawasan lingkungan, pelayanan pertanian, pelayanan investasi, pelayanan administrasi umum, pengembangan koperasi, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Untuk menjamin implementasi desentralisasi, pemerintah pusat juga mengalihkan tanggung jawab dan wewenang kepada daerah otonom untuk merencanakan, mengimplementasikan dan mengawasi pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

Hak pengelolaan keuangan daerah otonom memungkinkan pemerintah daerah untuk merencanakan anggaran pendapatan dan pengeluaran secara lebih fleksibel untuk mendukung pelayanan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan sosial berdasarkan skala prioritas. Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat menyusun alokasi pendapatan dan belanja untuk semua sektor pelayanan publik yang berbeda dengan daerah lain. Secara

umum, kebijakan alokasi anggaran disusun sedemikian rupa berdasarkan skala prioritas yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat.

Provinsi Jawa Tengah yang memiliki total populasi 34.257.865 pada tahun 2017 merupakan salah satu provinsi penyangga indikator ekonomi dan sosial pemerintah pusat. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu lumbung pada nasioan dengan rerata produksi padi mencapai 6,03 ton/ha. Dari sisi jumlah unit usaha UMKM, Provinsi Jawa Tengah memiliki unit usaha UMKM sebesar 95.560 atau sepertiga dari total unit UMKM di seluruh Indonesia.

Di sisi lain, Provinsi Jawa Tengah memiliki prosentase penduduk miskin sebesar 14,98% pada tahun 2018. Skor HIS warga Jawa Tengah menunjukkan skor rerata 70,52. Namun posisi HDI warga Jawa Tengah berada pada angka 70,52 dan berada pada posisi ke-4 dari bawah. Dari sektor kesehatan, sebanyak 32,72% masyarakat di Jawa Tengah, sebanyak 32.72% tercatat memiliki diagnosis kesehatan

#### **Alokasi anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai.**

Sektor anggaran untuk belanja dan gaji tunjangan pegawai pemerintah daerah merupakan sektor anggaran yang paling menghabiskan APBD pemerintah kabupaten/kota. Rerata prosentase anggaran belanja gaji dan tunjangan pegawai daerah seluruh kabupaten/kota mencapai 46,25% dari total APBD pemerintah kabupaten/kota. Sebanyak 4 pemerintah kabupaten/kota menghabiskan lebih dari 60% total APBD untuk sektor belanja pegawai, yaitu pemerintah Kabupaten Banyumas, pemerintah Kabupaten Cilcap, pemerintha kabupaten Klaten, dan pemerintah Kota Solo. Mayoritas pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan 25% sampai dengan 60% untuk belanja pegawai.

#### **Alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas dan tata kelola birokrasi**

Peningkatan kapasitas dan tata kelola birokrasi merupakan sektor anggaran yang menjadi prioritas alokasi anggaran untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal. Sebanyak 28 pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan rerata anggaran untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal sebesar 20% sampai dengan 30%. Tujuan dari alokasi belanja barang dan jasa serta modal adalah memperkuat fungsi birokrasi sipil yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

### **Alokasi anggaran untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.**

Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tujuan yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah termasuk pemerintah kabupaten/kota. Kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan dengan memberikan prosentase yang cukup pada sektor penguatan ekonomi, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, jaminan perlindungan sosial, dan perumahan serta fasilitas umum. Hasil analisis data penelitian menunjukkan tren bahwa hampir seluruh pemerintah kabupaten kota membagi alokasi anggaran pada sektor-sektor tersebut di atas pada kisaran antara 10% sampai dengan 40%. Hanya 2 pemerintah kabupaten/kota yang mengalokasikan anggaran pendidikan kurang dari 8%, yaitu pemerintah Kabupaten Temanggung dan pemerintah Kota Semarang.

Alokasi anggaran peningkatan ekonomi dan pelayanan kesehatan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan skor HDI masyarakat Jawa Tengah. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, jika pemerintah kabupaten kota berani mengalokasikan masing 30% anggaran untuk sektor penguatan ekonomi dan pelayanan kesehatan akan meningkatkan skor HDI hingga mencapai angka di atas 72, atau melebihi rerata HDI untuk tingkat Provinsi Jawa Tengah. Berbeda halnya dengan alokasi anggaran penguatan ekonomi dan pelayanan kesehatan, alokasi anggaran pendidikan tidak cukup signifikan untuk meningkatkan HDI masyarakat. Alokasi anggaran pendidikan yang mencapai 30% hanya mampu meningkatkan skor HDI sampai skor 60,44.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis data penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki kebijakan alokasi anggaran yang berbeda-beda tergantung kepada skala prioritas setiap pemerintah daerah.
2. Hampir semua pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan belanja pegawai dengan prosentase 25% sampai dengan 60%. Pemerintah kabupaten Banyumas, pemerintah Kabupaten Cilacap, Pemerintah Kabupaten Klaten, dan Pemerintah Kota Semarang bahkan harus mengalokasikan belanja pegawai yang menghasibiskan lebih dari 60% APBD.
3. Hampir seluruh pemerintah kabupaten/kota memiliki kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi anggaran yang cukup untuk sektor

penguatan ekonomi, pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, perumahan, dan fasilitas umum. Setiap pemerintah kabupaten/kota memiliki kebijakan sendiri untuk mengalokasikan belanja APBD untuk sektor-sektor tersebut. Hampir seluruh pemerintah kabupaten/kota membagi alokasi anggaran pada sektor-sektor tersebut di atas pada kisaran antara 10% sampai dengan 40%. Hanya 2 pemerintah kabupaten/kota yang mengalokasikan anggaran pendidikan kurang dari 8%, yaitu Kabupaten Temanggung dan pemerintah Kota Semarang. Pemerintah kota Semarang tidak mampu mengalokasikan anggaran pendidikan yang tinggi karena terbebani belanja pegawai di atas 70%. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Temanggung lebih memprioritaskan anggaran pelayanan umum dengan prosentase anggaran mencapai 40%.

4. Alokasi anggaran peningkatan ekonomi dan pelayanan kesehatan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan skor HDI masyarakat Jawa Tengah. Sedangkan alokasi anggaran pendidikan tidak cukup signifikan untuk meningkatkan HDI masyarakat.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih peneliti ucapkan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Unsoed, karena penelitian ini terselenggara karena dana penelitian BLU Unsoed Tahun anggaran 2018 Skema Riset Dosen Pemula dengan no kontrak 3835/UN.23.14/PN/2018

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amalia, F., 2012. Pengaruh Pendidikan, Pengangguran dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) Periode 201-2010. *EconoSains*. 10 (2):158-169.
- Arsyad, L., 2010. *Ekonomi Pembangunan*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) diakses pada 22 Februari 2018.
- Bappenas, 2010. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Tahun 2010-2014 Bidang Ekonomi* Bappenas. Jakarta
- Chen, H. J., 2014. Tourist segmentation in taiwan's wineries: a cultural perspective. *Sosial Behavior and Personality*, 2014, 42(2), 223-236
- Clausen, A., 2010. Economic globalization and regional disparities in the Philippines. *Singapore Journal of Tropical Geography*, 31: 299-316.
- Data Keuangan Daerah. 2018. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)



- Everitt, B. S., S.Landau, M. Leese, and D. Stahl, 2011. *Cluster Analysis*. John Wiley and Sons. New York
- Fahmi, I. dan S. Hendrawan, 2007. Kemiskinan versus Pertanian. *Agrimedia*, 12(1): 1-6.
- Guo-yong, M. A., 2010. Evaluation of regional innovation networks: based on principal component analysis. *Canadian Sosial Science* , 6(2): 34-43.
- Jolliffe, I., 2002. *Principal Component Anaysis, Second Edition, Springer Verlag, Ney York*. Springer Verlag. New York
- Kurz, H. D., 2010. Technical progress, capital accumulation and income distribution in Classical economics: Adam Smith, David Ricardo and Karl Marx. *Euro. J. History of Economic Thought*, 17(5): 1183-1222.
- Lee, S., 2011. Metropolitan Growth Patterns and Metropolitan Growth Patterns and Metropolitan Areas 1970-2000. *International Journal of Urban and Regional Research*, 35(5): 988-1011.
- Mubyarto, 1995. *Ekonomi dan Keadilan sosial*. Aditya Media: Yogyakarta
- Noll, H. N., 2002. Towards a European system of sosial indicators: Theoretical framework and system architecture. *Sosial Indicator Research*, 58: 1-3.
- Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Qin-dong, L. I. and N.U. Jing, 2010. Evaluation on integrated innovation capability of regions based on principal component analysis. *Canadian Sosial Science*, 6(4):12-19.
- Rahman, F.F. Ini Daftar Daerah dengan APBD yang Banyak Habis untuk Gaji Pegawai. Detik Finance. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3427718/ini-daftar-daerah-dengan-apbd-yang-banyak-habis-untuk-gaji-pns>. diakses pada 22 Februari 2018.
- Seknas Fitra, Laporan Analisis Anggaran Daerah 2016. Hasil penelitian di 70 Kabupaten/Kota. Diakses di laman [www.seknasfitra.org/](http://www.seknasfitra.org/)
- Sharma, A. 2012. Inter-state disparities in socio-economic development in north east region of india. *Journal of Agricultural Science* , 4 (9), 236-243.
- Soemartini. (2008). *Principal Component Analysis (PCA) Sebagai Salah Satu Metode untuk Mengatasi Masalah Multikolinearitas, UNPAD, Jatinangor*. Bandung: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjajaran.
- Todaro, M. P., S. Smith, 2006. *Economic Development* Vol. 9<sup>th</sup>. Pearson Education Limited. London
- Ul Haq, M. 1995. *Reflections of Human Development*. Oxford University Press New York
- Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
- Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Otonomi Daerah.
- Waluyo, I. 2010. Akankah Pemerintah Daerah Bangkut Karena Kenaikan Gaji Pegawai Daerah? Efisiensi. 11(1):50-58.
- Wandira, A.G. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*. 2(1): 44-51.
- Xiajing, D., and Z. Junjie, 2011. The TOPSIS Analysis on Regional Disparity of Economic Development in Zhejiang Province. *Canadian Sosial Science*, 7 (5), 135-139.
- Zhao, C., Y. Hao, 2014. Analysis of the regional economic differences and coordinated development countermeasures in Hebei province. *J. Chem. Pharm. Res.* , 6 (7), 1158-1163.